



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 7232366 Faksimili 7220219

NOTA DINAS

Nomor : **/ND/SD/V/2021**

Yth. : 1. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air;
2. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga;
3. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya;
4. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT
Dari : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal : Notulen Rapat Diskusi Identifikasi Ketersediaan Data Prioritas PUPR Mendukung Satu Data Indonesia
Tanggal : 06 Mei 2021
Lampiran : 2 (dua) berkas

Menindaklanjuti surat undangan Rapat Pembahasan Identifikasi Ketersediaan Data Prioritas PUPR Mendukung Satu Data Indonesia dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, bersama ini dengan hormat disampaikan notulen sebagaimana terlampir dengan hal yang menjadi catatan penting adalah :

1. Sekretariat Satu Data Indonesia saat ini sedang melakukan pengumpulan data prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga yang berfokus pada dukungan untuk SGD's, UMKM dan Bantuan Sosial. Dukungan data prioritas yang dibutuhkan dari Kementerian PUPR dengan objek data berupa :
 - a. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun;
 - b. Persentase sampah nasional yang terkelola;
 - c. Data ruang usaha di Rest Area, PLBN, KSPN dan Pasar;
 - d. Data infrastruktur Bina Marga
2. Kementerian PUPR melalui Pusdatin akan menyampaikan laporan secara tertulis berkala setidaknya 2 (dua) bulan sekali kepada Sekretariat Satu Data Indonesia terkait progress pemenuhan data prioritas maupun penyediaan data infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian PUPR dengan dukungan dari Unit Organisasi selaku produsen data tingkat pusat.
3. Pada tahap awal, selain objek data pada poin (1), akan disampaikan data baseline renstra serta data infrastruktur yang tersedia, paralel menunggu informasi dari direktorat teknis mengenai penyediaan data prioritas. Untuk penyampaian data infrastruktur akan dilakukan melalui mekanisme API atau *web services*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Lampiran I
Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Nomor : /ND/SD/V/2021
Tanggal : 06 Mei 2021

NOTULEN KEGIATAN		
Notulen ke:	Hari/tanggal: Kamis, 06 Mei 2021	
Jumlah halaman :	Tempat: Secara daring (<i>video conference</i>)	
No. Undangan UM 02 01-Sd/335	Tanggal Undangan 05 Mei 2021	Pengundang: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal :	Undangan Rapat Diskusi Identifikasi Ketersediaan Data Prioritas PUPR Mendukung Satu Data Indonesia	
Pemimpin rapat: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi		
Disusun oleh: Bidang Data dan Informasi	Agenda: 1. Penjelasan terkait identifikasi data dan informasi tingkat pusat oleh Sekretariat SDI 2. Pemenuhan data prioritas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 3. Mekanisme bagi pakai data prioritas bidang pekerjaan umum dan perumahan menggunakan API	
Diperiksa oleh: Bidang Data dan Informasi	Peserta: 1. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Bappenas; 2. Perwakilan Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Ditjen SDA; 3. Perwakilan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga; 4. Perwakilan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya; 5. Perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT; 6. Perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi.	
Pelaksanaan Rapat		
Rapat Diskusi Identifikasi Ketersediaan Data Prioritas PUPR Mendukung Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada hari Kamis, 06 Mei 2021 secara <i>daring</i> dan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.		
Diskusi		
1. Beberapa poin utama yang menjadi <i>goal</i> dalam transformasi digital PUPR, yakni : a. Kepuasan konsumen terhadap layanan Konsumen dengan mudah dapat mengakses seluruh layanan PUPR secara digital dengan menerapkan prinsip satu pintu akses, proses yang sederhana dan kecepatan proses layanan.salah satu contoh dalam hal pengajuan permohonan data, mekanisme persuratan dilakukan tidak secara manual namun melalui sistem. Dengan aplikasi layanan yang		

saat ini sedang disiapkan oleh Pusdatin berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik selaku pengawas PPID Kementerian, setiap layanan akan terpantau dalam progress pelaksanaannya termasuk kinerja dalam pemenuhan layanan.

b. Pegawai mudah dalam bekerja

Penerapan *working collaboration* diharapkan menjadikan kinerja pegawai lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perangkat digital dimana saja dan kapan saja.

c. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

Pimpinan dapat menerima data dan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat untuk digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

2. Komunikasi data dan informasi yang dikelola oleh 11 unit organisasi teknis kedepannya akan dilakukan melalui mekanisme API atau *web services* yang akan diawasi pengelolaannya oleh Pusdatin. Data dan informasi yang diperoleh dari proses penarikan API tersebut akan diolah menjadi data statistik dan dimanfaatkan pengelolaannya dalam bentuk neraca, infografis, pemetaan spasial dan lain sebagainya.
3. Alur pengelolaan data dan informasi dimulai dari PPK → satuan kerja → Balai → unit kerja teknis → unit kerja pengelola data dan informasi → Pusdatin. Pusdatin menggunakan platform satu sistem yaitu menu editor infrastruktur yang dapat menggunakan ArcGIS desktop maupun web GIS.
4. Pengendalian data dan informasi akan terus dipantau secara berkala oleh Pusdatin dan dilakukan secara terpusat dengan pemanfaatan teknologi seperti cloud. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui status pemutakhiran terhadap data. sehingga data dimanfaatkan dan mudah diakses.
5. Pusdatin sudah memiliki open data PUPR, yang didalamnya akan menampilkan data Kementerian, lintas unit organisasi di dalam Kementerian PUPR, data instansi lain yang menghasilkan data terkait Kementerian PUPR. Data tersebut berupa dataset, infografis dan produk buku. Dengan open data seperti ini harapannya nanti akan ada efek terhadap pertumbuhan lapangan kerja secara tidak langsung.
6. Aplikasi edit data infrastruktur PUPR sudah terpusat sehingga bisa memudahkan proses input dan editing data infrastruktur, data aset infrastruktur dipetakan berdasarkan data spasial. aplikasi diatur untuk hanya memberikan akses melihat dan mengedit data. Setiap tahunnya nanti setiap unit organisasi harus melakukan updating data kondisi hasil inspeksi terakhir.
7. Pusdatin juga memiliki dashboard neraca yang berisi profil infrastruktur PUPR yang menampilkan informasi-informasi terkait performa pertumbuhan data infrastruktur. Tampilan neraca output pada setiap infrastruktur nantinya menampilkan informasi secara spasial juga secara statistik di setiap provinsi.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Bappenas

1. Berdasarkan Perpres 39/2019 Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Dalam hal ini, sudah ada acuan pelaksanaan, ketersediaan data yang akurat, mendorong keterbukaan, serta mendukung sistem statistik nasional.

2. Prinsip Satu data Indonesia berupa standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Dan Pusdatin selaku walidata bertanggung jawab sebagai lulu lintas pengumpulan datanya.
3. Penyelenggara Satu Data Indonesia adalah Dewan Pengarah, yang dikelola oleh Pembina data keuangan negara, Dukcapil, data center, Bappenas, arsitektur SPBE, BPS, dan BIG.
4. Penyelenggaraan SDI secara terpadu sesuai dengan Perpres 39/2019 dimulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
 - Perencanaan data (pasal 26) berisi hal-hal terkait daftar data, daftar data prioritas, rencana aksi, kode referensi, data induk, arsitektur data, permasalahan lainnya, dan rencana aksi
 - Pengumpulan data (pasal 32) terdiri dari beberapa kategori, tertutup dan terbuka.
 - Pemeriksaan data yang dilakukan oleh pembina data yang dilakukan oleh masing-masing walidata, seperti BIG yang berkaitan dengan spasial, BPS yang berkaitan dengan statistik, serta Kementerian Keuangan. Data-data tersebut nantinya akan disesuaikan berdasarkan standar data, kode referensi, metadata, dan interoperabilitas.
 - Penyebarluasan data (pasal 36 ayat 2) dilakukan di portal SDI ataupun media lainnya.
5. Forum SDI terdiri dari BIG, BPS dan Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dalam penyusunan kode referensi.
6. Regulasi terkait integrasi data pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang melakukan konfirmasi pada semua K/L mengenai integrasi data melalui API sesuai dengan regulasi.

SDI merupakan penghubung antar semua data dan informasi pemerintah.

7. Tujuan adanya SDI sebagai :
 - Mengembangkan data warehouse pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 95/2018 dan Perpres 39/2019 serta regulasi turunannya, khususnya Permen PPN/Kepala Bappenas No 16/2020
 - Menyediakan strategi dan teknologi yang konsisten dan telah direkonsiliasi pada pihak (K/L dan daerah) dan digunakan pemerintah untuk analisis data dan kebijakan publik, yang didasarkan pada data operasional, data pendukung keputusan, dan data eksternal, kepada semua unit organisasi pemerintah
 - Integrasi dan sinkronisasi semua data dan informasi yang dimiliki oleh K/L dan daerah melalui API antara sistem yang dikembangkan K/L dengan sistem yang berada di Sekretariat SDI
 - Data warehouse sebagai sumber data terintegrasi dan tervalidasi sebagai bahan melakukan *analytic processes* bagi decision maker dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pembangunan nasional
8. Manajemen akses data berupa data terbuka, data terbatas, dan data tertutup. Masing-masing walidata dapat bekerjasama dengan produsen datanya untuk melakukan klasifikasi akses data yang ada di dalam instansinya, untuk kemudian diinformasikan kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat.
9. Prioritas data yang ada di SDI saat ini adalah SDGs, UMKM, dan data BANSOS.

10. Belum adanya arahan terkait standar data yang ada di SDI ini mengikuti standar data dari walidata atau bagaimana. Ke depannya nanti akan didiskusikan kembali terkait standar data ini nantinya akan mengikuti arahan darimana.
11. Mengenai roadmap atau rencana kerja yang berkaitan dengan SDI ini nantinya akan dikoordinasikan kembali kepada setiap K/L atau walidata yang data-datanya akan diintegrasikan dalam SDI.
12. Kebutuhan data di Bappenas terhadap data-data infrastruktur sangat besar. Namun, sampai saat ini untuk Musrenbang sendiri akses data yang berbasis GIS belum bisa digunakan karena adanya keterbatasan waktu. Hingga saat ini aplikasi yang sudah bisa diakses dari Musrenbang Bappenas adalah Krisna-Selaras yang menampilkan kesepakatan antara Pemda, K/L dengan Bappenas terkait kegiatan yang prioritas.
13. Semua data di setiap K/L nantinya bisa terintegrasi dengan portal data SDI. Dan SDI sangat terbuka terkait list data apa saja yang dibutuhkan pada formulir. Namun, yang menjadi prioritas saat ini adalah data-data yang mendukung 3 program strategis Nasional atau data-data yang mendukung Prioritas Nasional Proyek Prioritas.

Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya

1. Ditjen Cipta Karya sudah melakukan pembinaan secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan Satu Data Cipta Karya pada Balai di daerah. Selanjutnya Balai akan melakukan pembinaan untuk penyediaan data pada tingkat kabupaten/kota.
2. Kendala yang dihadapi saat penyediaan data adalah terkait teknis dan detail data. Perlu adanya wacana pengadaan insentif untuk petugas yang melakukan penginputan atau pemutakhiran data agar pemenuhan data infrastruktur lebih optimal.
3. Data-data dasar yang sering dibutuhkan oleh Ditjen Cipta Karya, seperti berupa jumlah penduduk, atau kewilayahan bisa agar bisa diintegrasikan. Dan juga data-data terkait sanitasi dan air minum yang ada di SIPD agar bisa diintegrasikan juga sehingga bisa memperkaya kebutuhan data di Ditjen Cipta Karya.
4. Berdasarkan kebutuhan data prioritas mendukung SDG's, UMKM dan Bantuan Sosial yang disampaikan oleh Sekretariat SDI, Ditjen Cipta Karya berperan dalam pemenuhan variabel data berupa :
 - a. Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap SPALD-T
 - b. Jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan
 - c. Jumlah timbulan sampah nasional yang dikelola
 - d. Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
 - e. Data Ruang Usaha di PLBN, KSPN, dan Pasar
5. Kaitannya dengan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap SPALD-T. Data masih bersifat dinamis sehingga perlu pemutakhiran karena data diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota. Data-data terkait SPALD-T sudah tersedia di DWH Cipta Karya dan dapat langsung diintegrasikan melalui API.
6. Terkait data mengenai jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan dan dikelola, sesuai dengan pembahasan terakhir antara Kementerian LHK dan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya, bahwa

untuk pengelolaan datanya diserahkan kepada Kementerian LHK, Ditjen Cipta Karya hanya berfokus pada pembangunan infrastrukturnya.

7. Ruang usaha di PLBN, data jumlah kapasitas usaha yang bisa dilakukan di PLBN datanya tidak terlalu berbunyi. Namun, jika membahas mengenai pemanfaatannya, nantinya datanya bisa dimintakan ke Balai di daerah. Terkait data luasan ruang usaha yang dibangun di masing-masing PLBN datanya sudah tersedia.
8. Direktorat Bina Teknik akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan data prioritas dengan melakukan koordinasi internal dengan unit kerja teknis serta balai di lingkungan Ditjen Cipta untuk selanjutnya data yang sudah terkumpul diserahkan ke Pusdatin dan disampaikan ke Sekretariat SDI. Ditjen Cipta Karya sudah menyediakan instrumen data yang disampaikan ke setiap Kabupaten/Kota.

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga

1. Ditjen Bina Marga sangat mendukung program SDI, terutama kedepannya kegiatannya ini akan mempermudah setiap stakeholder dalam berbagi pakai data.
2. Data infrastruktur bina marga sesuai dengan kebutuhan data prioritas sudah tersedia. Namun, akan dilakukan pembahasan kembali untuk detail dari variabel pembentuk yang akan disampaikan.
3. Selain data infrastruktur yang diolah oleh Ditjen Bina Marga, diperlukan dukungan dari instansi lain untuk menyempurnakan data yang sudah ada agar menghasilkan informasi yang lebih baik lagi. Sehingga usulan dari Ditjen Bina Marga adalah agar Sekretariat Satu Data Indonesia dapat menjembatani pertukaran data antara instansi/lembaga pemerintah lainnya diluar Kementerian, salah satu contohnya Kepolisian.
4. Data-data infrastruktur yang ada di Ditjen Bina Marga yang tersedia lengkap adalah data jalan yang menjadi kewenangan nasional, sedangkan untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten masih perlu dilakukan pengecekan kembali karena dalam penetapan setiap ruasnya tidak dikelola langsung oleh Ditjen Bina Marga.

Badan Pengatur Jalan Tol


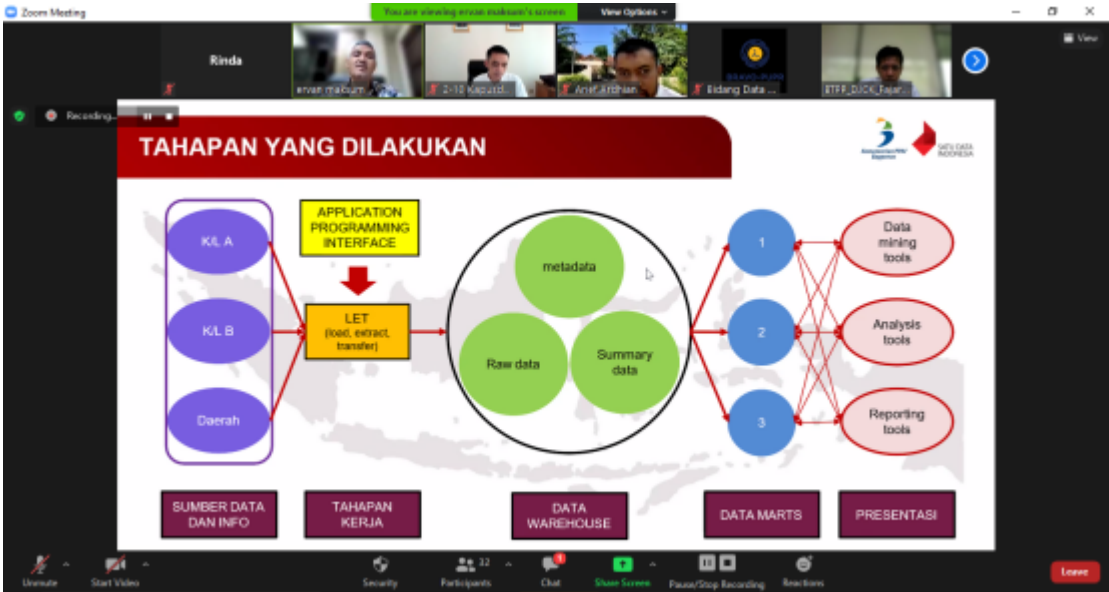
1. Data-data terkait ruang usaha di rest area, data-datanya dikelola langsung oleh BUJT, sehingga BPJT memerlukan waktu untuk mengajukan surat permintaan data ke BUJT.
2. Dalam sistem informasi BPJT telah tersedia data-data mengenai rest area, namun perlu dilakukan pemutakhiran data dengan berkoordinasi dengan setiap BUJT. Sehingga nantinya API bisa langsung diintegrasikan dengan kebutuhan di Bappenas

Kesimpulan

1. Sekretariat Satu Data Indonesia sedang mencoba mengidentifikasi data pendukung untuk 3 program strategis yaitu SDG's, UMKM dan Bantuan Sosial dari Kementerian/Lembaga terkait. Dukungan data prioritas yang dibutuhkan dari Kementerian PUPR dengan objek data berupa :
 - a. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun;
 - b. Persentase sampah nasional yang terkelola;
 - c. Data ruang usaha di Rest Area, PLBN, KSPN dan Pasar;
 - d. Data infrastruktur Bina Marga

2. Data-data yang ada di lingkup Kementerian PUPR status datanya bersifat terbuka sehingga bisa dibagi pakaikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing K/L. Namun, untuk data-data mengenai perencanaan dan anggaran saja yang memang bersifat tertutup.
3. Terkait data-data yang dibutuhkan oleh Sekretariat SDI akan dilakukan pendetailan kembali sehingga perlu adanya koordinasi internal di Kementerian PUPR. Prioritas utama dalam pemenuhan data prioritas satu data indonesia adalah penyampaian data renstra, menyusul secara bertahap adalah data-data yang sudah tersedia lengkap di unit organisasi seperti data jalan pada di Ditjen Bina Marga atau data air minum pada Ditjen Cipta Karya
4. Perlu adanya wacana pengadaan insentif untuk petugas yang melakukan penginputan atau pemutakhiran data agar pemenuhan data infrastruktur lebih optimal.
5. Sekretariat Satu Data Indonesia akan menyiapkan *road map* atau rencana kerja yang akan disampaikan kepada walidata dan produsen data untuk digunakan sebagai acuan dalam sinergitas pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia.
6. Kedepannya diharapkan data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dapat terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Untuk saat ini, Sekretariat SDI terbuka untuk menerima masukan dari produsen data untuk data-data yang disampaikan.

Lampiran II
 Nota Dinas Kepala Bidang Data dan Informasi
 Nomor : 13/ND/BDI/III/2021
 Tanggal : 06 Mei 2021

DOKUMENTASI KEGIATAN		
Notulen ke:	Hari/tanggal: Kamis, 06 Mei 2021	
Jumlah halaman :	Tempat: Secara daring (<i>video conference</i>)	
No. Undangan UM 02 01-Sd/335	Tanggal Undangan 06 Mei 2021	Pengundang: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal : Undangan Rapat Diskusi Identifikasi Ketersediaan Data Prioritas PUPR Mendukung Satu Data Indonesia		
		
		

Zoom Meeting

You are viewing 601 Daniel Lutfi's screen

Rinda

emang tdk ada

2-10 Kapatid

Arif Aishan

Salma Shm...

Rappana, Pu...

RESEARCH DATA MANAGEMENT PPT 01 - Rinda

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Font Paragraph Styles

General Conditional Formatting Cell Styles Insert Delete Format Font Styles Editing

RESEARCH DATA MANAGEMENT PPT 01 - Rinda

No.	Nama Dataset	Objek Data / Respon	Variabel Pembantu	Diagram	Format Diagram Data	Metode	Produk Data
1.		6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang diklasifikasi secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	JKTST : jumlah rumah tangga dengan akses terhadap SPALDT	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Tabulasi	Optik Karna
2.		6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang diklasifikasi secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	JTSP : Jumlah tindakan sanitasi nasional yang dipromosikan secara nasional	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Tabulasi	Optik Karna
3.		11.6.100 Persentase sanitasi nasional yang tersedia	JTST : Jumlah tindakan sanitasi nasional yang tersedia	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Tabulasi	Optik Karna
4.		6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang diklasifikasi secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	JKTST : Banyaknya rumah tangga yang terdapat sistem pengkungan longgar tiga	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Tabulasi	Optik Karna
5.		Data Ruang Usaha di Red Area, RUIH, KSPN dan Pasar		Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	TBC	
6.		Data Indikator sektor lain yang		Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse	Belum bisa dipaparkan karena data masih ada di Harddisk / Prodiuse		Waktu Karna (T
7.							
8.							
9.							
10.							

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions Leave